

**Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Terhadap  
Perundang-Undangan, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Opini Badan  
Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**RESTIA RAHIM**

**01031181722014**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**“PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL, KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERUNDANG  
UNDANGAN, DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP  
OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA”**

Disusun Oleh:

Nama : Restia Rahim  
NIM : 01031181722014  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

**Tanggal Persetujuan**

Tanggal

: 28 Maret 2023

**Dosen Pembimbing**



Dr. E. Yushaini, SE, M.Si, Ak

NIP 19770417 201012 2 001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,**  
**KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN, DAN**  
**KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP OPINI BADAN PEMERIKSA**  
**KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI**  
**INDONESIA**

Disusun Oleh:

Nama : Restia Rahim  
NIM : 01031181722014  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah di Uji dalam ujian komprehensif pada tanggal 31 Mei 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 31 Mei 2023

Ketua

  
Dr. E. Yumnaini, S.E., M.Si, Ak  
NIP. 197704172010122001

Anggota

  
Eka Meirawati, S.E., M. Si., Ak  
NIP. 196905251996032001

Mengetahui

**ASLI** Ketua Jurusan Akuntansi  
JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI  
  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP.197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Restia Rahim  
NIM : 01031181722014  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Pembimbing : Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si, Ak

Tanggal Ujian : 31 Mei 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan, dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, Juni 2023



METERAI  
TEMPEL  
761AKX476558386

Restia Rahim

01031181722014

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

Kadang kita berprasangka Allah itu menghalangi sesuatu yang kita inginkan, padahal Allah menunda supaya bisa memperlihatkan pada kita sesuatu yang lebih baik dari yang kita inginkan.

Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.

(Ali bn Abi Thalib)

Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar

(Umar bin Khattab)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Suami dan Anakku
3. Kedua orang tuaku
4. Keluarga Besarku
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Terhadap Perundangan-Undangan, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai kendala, namun dapat teratasi berkat bimbingan, dukungn serta doa dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang secara langsungmaupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai masukan yang positif, sehingga membantu memperlancar terselesaikannya skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Universitas Sriwijaya .

Indralaya, 2023



Restia Rahim

## UCAPAN TERMAKASIH

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf., MSCE., Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof.Dr. M. Adam, S.E., M.E.,Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA , Ketua jurusan Akuntansi
4. Ibu Dr.E. Yusnaini, S.E.,M.Si., Ak., Dosen Pembimbing Skripsi saya.  
Terimakasih kepada dosen pembimbing terbaikku bu Yusnaini, terimakasih telah membantu mempermudah proses skripsi dan terimakasih karena selalu mendengarkan dan mengerti dengan keadaan saya. Terimakasih sudah menjadi dosen pembimbing terbaik yang pernah saya temukan, Semoga ibu sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya.
5. Ibu Eka Meirawati, S.E.,M. Si., Ak , Dosen penguji komprehensif.  
Terimakasih dosen penguji yang baik hati untuk masukan dan ilmu nya.
6. Suami tercinta Danu Bika Alpajar, terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan perhatian yang selalu tcurahkan kepada saya selama proses penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada ibuku atas dukungannya baik moral maupun materil, berjuang membiayakan anaknya agar menjadi Sarjana.Terimakasih sudah menjadi orang terdepan yang selalu support dalam kondisi apapun . Semoga dimasa depan anakmu menjadi orang yang sukses agar bisa membahagiakanmu, Aamiin.

8. Terimakasih kepada anakku Callista Hanifa Resnu, dari kamu di dalam kandungan hingga sekarang kamulah yang menjadi motivasiku agar bangkit walau dijatuhkan berkali-kali dengan keadaan.
9. Terimakasih kepada sahabat karibku Septi Giana atas segala dukungan dan kontribusinya dari mulai masuk kuliah hingga sekarang.
10. Terimakasih terkhususnya teman kuliahku, Beta, Mirnawati, Adinda, serta Titis yang telah membantu dan selalu cepat respon dalam memberikan informasi mengenai pengurusan berkas-berkas.
11. Teman-teman akuntansi S1 Indralaya , terimakasih atas kebersamaannya selama masa kuliah
12. Terimakasih kepada staf maupun admin jurusan akuntansi yang selalu sigap membantu kami dalam pengurusan berkas kuliah
13. Terimakasih kepada diriku sendiri, Restia Rahim. Tetap memilih bertahan dan terus melangkah walau lamban dari yang lain, kuat menghadapi segala cobaan, terimakasih aku.

Indralaya, 8 Juni 2023

Penulis,



Restia Rahim

NIM. 01031181722014



## ABSTRAK

**Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Terhadap  
Perundang-Undangan, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Opini Badan Pemeriksa  
Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**

Oleh :

**Restia Rahim**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal, ketidapatuhan terhadap perundang-undangan, dan karakteristik daerah terhadap opini BPK. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit BPK. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, ketidapatuhan terhadap perundang-undangan, dan karakteristik daerah. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi sebanyak 170 laporan keuangan pada tahun 2015-2019. Sumber data menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) tahun 2015-2019. Metode analisis data menggunakan regresi logistik ordinal dengan memakai software SPSS versi 22. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, ketidapatuhan terhadap perundang-undangan, dan karakteristik daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap opini badan pemeriksa keuangan

**Kata Kunci : Opini Audit BPK, Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Karakteristik Daerah.**

Ketua,



Dr. E. Yustiani, S.E., M.Si, Ak

NIP. 197704172010122001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP.197303171997031002

**ABSTRACT**

***The Effect Of Implementation Internal System Control, Following Influence On  
The Law, And Local Characteristics The Opinion Financial Audit Board on  
Financial Report of Local Governments in Indonesian***

**By:**

**Restia Rahim**

*This research is aimed to analyse the effect of implementation internal system control, following influence on the law, and local characteristics the BPK audit opinion. The dependent variable is the BPK audit opinion. The independent variable is internal system control, following influence on the law, and local characteristics. The samples of this research consisted of 170 province financial statements in the Indonesian at 2015-2019. Data source are local government financial statement (LKPD) and the overview of the final test the year of 2015-2019. The method of data analyze is logistic regression ordinal with the use SPSS a version of 22. The result showed that the effect of implementation internal system control, following influence on the law, and local characteristics showed no significant effects on the BPK audit opinion.*

**Keywords :** *BPK audit opinion., internal system control, following influence on the law, and local characteristics.*

*Chairman,*



Dr. E. Yusnani, S.E., M.Si, Ak

NIP. 197704172010122001

*Acknowledge by,*

*Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP.197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK


Kami dosen pembimbing menyatakan bahwa abstrak dalam bahasa ingggis dari mahasiswa:

Nama : Restia Rahim  
NIM : 01031181722014  
Jurusan : Akuntansi  
Matakuliah : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan *tenses-nya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak

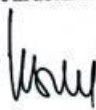
Indralaya, 8 Juni 2023

Ketua,

  
Dr. E. Yusraini, S.E., M.Si, Ak  
NIP. 197704172010122001

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP.197303171997031002

## RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Restia Rahim  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Bungo, 4 April 1999  
Agama : Islam  
Status : Sudah Menikah  
Alamat Rumah : Jl. Indung Hidup, Rt 04, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang, Kec Sarolangun, Kab Sarolangun, Prov Jambi



### PENDIDIKAN FORMAL

1. 2005-2011 : SDN 04 Sarkam 1 Sarolangun, Jambi
2. 2011-2014 : SMPN 1 Sarolangun, Jambi
3. 2014-2017 : SMAN 1 Srolangun, Jambi
4. 2017-2023 : S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

### PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. 2019 : Les Akuntansi “Prospek”

### PENGALAMAN ORGANISASI

2017-2020 : Anggota LDF Ukhuwah, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERMAKASIH</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK</b> .....	xi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii`
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Landasan Teori.....	10

## DAFTAR ISI (Lanjutan)

2.1.1	Teori Keagenan .....	10
2.1.2	Opini BPK.....	13
2.1.3	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	14
2.1.4	Sistem Pengendalian Internal .....	15
2.1.5	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	17
2.1.6	Karakteristik Daerah .....	18
2.2	Penelitian Terdahulu .....	19
2.3	Kerangka Pemikiran .....	22
2.4	Hipotesis .....	23
2.4.1	Pengaruh Kelemahan SPI terhadap opini BPK atas LKPD .....	24
5.4.2	Pengaruh Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK.....	25
5.4.3	Pengaruh Karakteristik Daerah Terhadap Opini BPK .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>29</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	29
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	29
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.4	Populasi dan Sampel.....	30
3.5	Teknik Analisis Data .....	32
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif .....	32
3.5.2	Analisis Regresi Logistik Ordinal .....	33
3.5.3	Uji Hipotesis .....	35
3.5.3.1	Uji Likelihood L .....	36

## DAFTAR ISI (Lanjutan)

3.5.3.2	Uji F ( <i>Goodness of Fit Models</i> ) .....	36
3.5.3.3	Uji Pseudo R-Square .....	37
3.5.3.4	Uji Parallel Lines .....	37
3.5.3.5	Uji Wald .....	38
3.6	Defenisi Oprasional .....	39
3.6.1	Variabel Dependen .....	39
3.6.2	Variabel Independen .....	42
3.6.2.1	Sistem Pengendalian Internal .....	42
3.6.2.2	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	43
3.6.2.3	Karakteristik Daerah .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>49</b>
4.1	Gambaran Umum Penelitian .....	49
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis .....	50
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	50
4.2.2	Analisis Regresi Logistik Ordinal .....	52
4.2.2.1	Case Processing Sumarry .....	53
4.2.2.2	Uji G .....	54
4.2.2.3	Uji Goodness of Fit.....	55
4.2.2.4	Koefisien Determinasi Model .....	56
4.2.2.5	Uji Wald .....	57
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
4.3.1	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini BPK.....	58

## **DAFTAR ISI (Lanjutan)**

4.3.2 Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan Terhadap opini BPK.....	59
4.3.3 Pengaruh Karakteristik Daerah Terhadap Opini BPK.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
5.1 Kesimpulan Penelitian .....	62
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	62
5.3 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN</b> .....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.6 Oprasionalisasi, Indikator, dan Skala .....	47
Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian .....	49
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.3 Case Processing Summary .....	53
Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji G .....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Goodness Of Fit.....	55
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi Model .....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Wald .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018 .....	3
Gambar 2.2 Model Penelitian .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

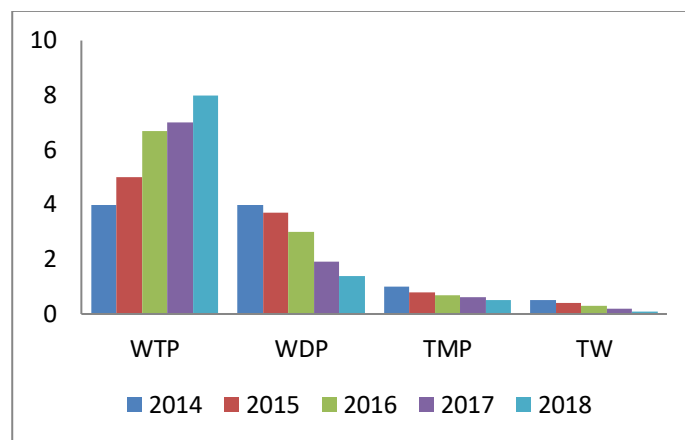
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah berupa laporan keuangan dengan sub-subnya yang sudah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait pengelolaan keuangan, baik itu keuangan negara maupun keuangan daerah selalu mengalami perubahan setiap waktu. Adanya perubahan inilah yang merupakan salah satu program pemerintah agar terciptanya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Widodo & Sudarno, 2017). Sebagai tolak ukur mengenai berhasil atau tidaknya dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari pengelolaan keuangannya yang baik dan dapat memberikan suatu kepastian mengenai suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan (Ruspina, 2013). Pemerintah daerah bersama dengan BPK harus mengelola keuangan daerah dengan sebaik mungkin (Simangunsong, 2014).

Dalam pasal 23 ayat (1) E UUD 1945 mengamanatkan bahwa dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh suatu badan yang bernama BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri. Agar dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara berjalan dengan baik maka BPK mempunyai standar aturan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Standar aturan tersebut yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN) pengganti dari Standar Audit Pemerintah (SAP). Dalam pelaksanaan tugasnya menghasikan sebuah opini yang merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Nalurita, 2015). Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan laporan audit yang dibuat oleh BPK. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari tiga fase yaitu keuangan, pengendalian internal dan kepatuhan. Banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dipengaruhi oleh penerapan sistem keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prasetyaningsih, dkk. 2014).

BPK bukan hanya melakukan tugas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah saja, tetapi juga melaksanakan tugas untuk menguji dan menilai terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. BPK pun harus turut mengukur kepatuhan pada ketetapan perundang-undangan ketika menjalankan pemeriksaan (Widodo & Sudarno, 2017). Ada beberapa faktor yang kemudian menjadi penyebab tidak diperolehnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan pemerintah daerah menurut penjelasan BPK dalam *websitenya* yaitu dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal dalam pemerintah daerah, belum tertibnya organisasi barang yang dimiliki daerah/negara, penyimpangan atas peraturan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta kapasitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan masih cukup terbatas. Sehingga sistem pengendalian internal berikut kepatuhan pada perundang-undangan kemudian menjadi permasalahan yang membuat pihak BPK RI harus menyajikan opini atas LKPD.

Menurut rekapitulasi pemeriksaan BPK pada IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) 1 2019 memuat permasalahan temuan kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal sebesar 5.858 berikut Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan sebesar 6.259. Kemudian pada rekapitulasi pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2019 mengalami penurunan temuan yaitu kelemahan SPI terhadap pemerintah daerah yang ditemukan senilai 514 dan ketidakpatuhan pada perundang-undangan senilai 1.078. Akan tetapi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018, opini laporan keuangan pemerintah daerah lebih meningkat. LKPD yang mendapat opini WTP meningkat dari tahun ketahun dan LKPD yang mendapat opini TW (Tidak Wajar) mengalami penurunan. Hal tersebut ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018

Sumber : BPK-RI berdasarkan Publikasi [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Kenaikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pertahunnya menajdi gambaran sistem pengelolaan berikut

tanggung jawab keuangan daerah yang terus diperbaiki, terutama terkait pencatatan berikut pelaporan keuangan daerah dari pihak pemda. Namun seiring dengan kenaikan opini WTP dan WDP, masih ada pula opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) yang diberikan BPK. Hal tersebut menunjukkan efektivitas SPI pemda yang dinilai masih belum maksimal. LKPD yang mendapatkan opini WTP ataupun WDP menunjukkan bahwa SPI pemdanya telah cukup memadai, namun bagi yang mendapatkan opini TMP dan TW masih membutuhkan adanya perbaikan pada pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun sistem pengendalian internal merupakan suatu proses dengan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara integral dan terus-menerus oleh pihak pimpinan berikut segenap pegawai guna meyakinkan bahwa tujuan organisasi sudah tercapai lewat upaya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien (Riyanto, 2008). Sehingga upaya untuk mengelola keuangan berikut aset yang dimiliki pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui penyusunan sistem pengendalian internal oleh manajemen pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menyusun SPI pemerintah diperlukan untuk dapat mengedepankan aspek SPI, yakni terkait lingkungan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan (Solihin, 2009). Kemudian SPI dapat dinilai memadai ketika mendapati serangkaian unsur di dalamnya telah menyampaikan pengendalian yang relevan dan berhasil membuat para penggunanya yakin bahwa laporan keuangan telah terbebas dari kesalahan penyajian secara materialnya. Dengan kata lain, opini BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah terkait juga beroleh pengaruh dari SPI dalam lingkup entitas terkait. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Widodo & Sudarno (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, di dalam penelitiannya menggunakan analisis *parameter estimates* untuk pengujian hipotesis. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut serupa bahwa semakin menurunnya perubahan opini audit terdampak dari pengendalian internal oleh entitas yang lemah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Safitri & Darsono (2015) yang melalui analisis regresi logistik dengan hasil yang memperlihatkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pemberian opini BPK atas laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibagi menjadi kelompok temuan yang terdiri atas temuan kerugian daerah, kelompok temuan potensi kerugian daerah, kelompok temuan kekurangan penerimaan daerah, kelompok temuan administrasi dan kelompok temuan tindak pidana (BPK-RI, 2010). Adapun ketidakpatuhan pada perundang-undangan yang ditemukan telah memperlihatkan adanya penyimpangan oleh agen ketika mengelola keuangan negara (Kusumawati & Ratmono, 2017). Turut disampaikan dalam SPKN bahwa terjadinya ketidakpatuhan ini memungkinkan adanya kesalahan penyajian laporan pada aspek material atas informasi dalam data laporan secara signifikan sebagaimana tujuan dari dilakukannya pemeriksaan, untuk itulah pemeriksaan perlu melalui perancangan optimal guna mendeteksi atau memprediksi kemungkinan munculnya ketidakpatuhan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan

akan langsung mempengaruhi proses penyajian laporan keuangan, terutama dalam aspek materialnya. Munawar (2016), Widodo & Sudarno (2017), serta Fatimah, dkk. (2014) dalam penelitiannya, dengan menggunakan analisis regresi logistik ordinal dalam penelitiannya mengungkap bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan pada penerimaan opini audit. Kesimpulannya, terdapat pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hingga kemudian membuat tingkatan opini audit WDP semakin melemah dan beralih menjadi TW. Berbanding terbalik terhadap penelitian yang dilakukan oleh Maabuat, dkk. (2015) dengan menggunakan analisis *parameter estimates* dalam menguji hipotesis, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak mempengaruhi pemberian opini audit BPK atas LKPD.

Karakteristik daerah merupakan ciri khusus yang daerah miliki, sebagai identitas untuk mengidentifikasikannya dengan daerah lain. Salah satu karakteristiknya yaitu ukuran pemerintah daerah yang dinilai dari total aset. Kemudian pada umumnya, fungsi dari proses pengelolaan barang yang dimiliki daerah/negara dinilai begitu krusial dan strategis. Setiap daerah memiliki karakteristiknya tersendiri yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Karakteristik pemerintah telah digunakan dalam beberapa penelitian, dengan menggunakan beberapa indikator untuk menunjukkan ciri khusus pemerintah daerah. Indikator tersebut diantaranya menggunakan ukuran pemerintah daerah (Suhardjanto, Dkk 2011). Model penelitian dalam penelitian Pratiwi & Aryani (2016) yaitu analisis regresi linier berganda dengan hasil dari uji regresi variabel ukuran daerah memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang diberikan



ukuran daerah pada opini audit BPK atas LKPD. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosadi & Okfitasari (2019) menggunakan *binomial logistic regression* (BLR) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini yang BPK berikan pada LKPD. Dari paparan fenomena berikut temuan adanya ketidakselarasan atau ketidaksamaan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Terhadap Perundangan-Undangan, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Ketidakpatuhan pada perundang-undangan pada opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Karakteristik Daerah pada opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia?

## **3. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia.
2. Menguji pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan pada opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia.
3. Menguji pengaruh Karakteristik Daerah pada opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat memperluas literatur maupun memberikan informasi mengenai sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan karakteristik daerah berpengaruh terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis yaitu dari adanya penelitian ini bagi pemerintah daerah dapat menjadi acuan dalam penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta memperhatikan faktor karakteristik daerah sehingga bisa memperoleh atau mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu untuk BPK diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi audit yang telah diperiksa sehingga dapat dijadikan referensi dalam pengembangan pemeriksaan keuangan khususnya pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota yang ada di

Indonesia. Bagi akademisi yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik. Harapan selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Arens, *Et.Al.* 2015. *Auditing & Jasa Asurance: Pendekatan Terintegrasi*, Edisi Kelima Belas Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019*. [Http://Www.Bpk.Go.Id](http://www.bpk.go.id). Diakses 17 November 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019*. [Http://Www.Bpk.Go.Id](http://www.bpk.go.id). Diakses 17 November 2020.

BPK-RI. (2010). Keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor : 5/K/I-XIII.2/8/2010 Tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan. *Jakarta : Penerbitan BPK-RI*.

Dewata, E., Hadi, J., Siska, A., & Hijria, E. N. (2018). *The Effects Of Local Government Characteristics And Audit Opinion On The Performance Of District And City Governments In Indonesia*. 5(2013), 151–162.

Dewata, E., Jauhari, H., Aprianti, S., & Hijria, E. N. (2018). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja*

*Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*. 5(2013), 151–162.

Fatimah, D., Ria, N. S., & M, R. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3 (1), 1–15.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23*.

Indrianto, N., & Supomo, B. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. *Yogyakarta: BPFE*.

Jensen, M. C., & William, H. M. (1976). Theory Of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. *North-Holland Publish Company*.

Kapp, R. W. (1978). *Some Problems Of A Legal Compliance Audit*. 33 (4), 2467–2472.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2004). *Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Komite*.

Kusumawati, D., & Ratmono, D. (2017). Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 6, 1–15.

Lane, J. E., & Kivisto, J. A. (2008). Interests, Information, And Incentives In Higher Education: Principal-Agent Theory And Its Potential Applications To The Study Of Higher Education Governance. *Handbook Of Theory And Research*, 23, 141–179.

Maabuat, J. S., Moros, J., & Saerang, D. P. . (2015). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Maslani. (2008). Meningkatkan Akuntabilitas Publik Melalui Optimalisasi Manajemen Aset Negara/Daerah. *Di Akses Tanggal 17 Maret 2021*.  
<https://pusdiklatwas.bpkp.go.id>

Munawar. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit Atas SPI Dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 57–67.

Nalurita, N. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*.

Nuraeni, & Martani, D. (2012). *The Impact Of Local Governments Characteristics Toward Their Audit Quality For Financial Reports Of 2008-2009 3rd Internasional Conference On Business And Economic Research (3rd ICBER 2012)*.

Prasetyaningsih, E., Gufratul, Y., & Heri, S. (2014). *Internal Control System Weakness And Non-Compliance To The Provision Of Legislation In Practicing Audit Of Local Government In Indonesia. Internal Control System Weakness And Non-Compliance To The Provision Of Legislation In Practicing Audit Of Local Gove. 257–264*.

Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah , Kepala Daerah , Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. Xx(02), 167–189.

Rahmasari, D. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dan Total Aset Terhadap Opini Audit Dengan Tingkat Pengungkapan Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Sebagai Varia.

Riyanto, A. (2008). Sosialisasi SPIP PP 60 Tahun 2008. *Jakarta: BPKP*.

Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(02), 2019, 148-157 Pengaruh, 19(02), 148–157.

Rosadi, S, S., & Aisyah, H. N. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (02), 99–111.

Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Ejurnal Universitas Negeri Padang, Jurnall Akuntansi*, 1 (3): 1-2.

Saeed, M. H., & Dashti, D. M. H. (2014). *Study Of Internal Control Of Local Government Mohamed*. 5(4), 106–109.

Safitri, N. L. K. S. A., & Darsono. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah*. 5(2010), 1–12.



Safitri, R. H., & Aulia, B. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Opini Pada Lkpd Sumsel Berdasarkan Penerepan Sap. *Teori Dan Riset Administrasi Publik, 1*, 120–128.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9*(2), 154–170.  
<https://doi.org/10.24914/Jeb.V18i3.286>

Simangunsong, R. (2014). *The Impact Of Internal Control Effectiveness And Internal Audit Role Toward The Performance Of Local Government. 5*(7), 50–59.

Solihin, D. (2009). Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan Dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan. *Jakarta : Bappenas*.

Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Sugiyono. (2013b). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif Dan R&D. *Bandung: Alfabeta.CV*, 48–66.

Suhardjanto, D., Y. Dan R. R. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di*

*Indonesia).*

Tjandrakirana, R., Ermadiani, Rohman, A., & Widad, A. (2019). Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidapatuhan Pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12, 186–207.

Widodo, O. P., & Sudarno. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2010), 1–9.

Yamin, R., & Sutaryo. (2015). *Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Kuntansi Ke-18. . No. 119. Medan.*

Yuliara, I. M. (2016). *Regresi Linier Berganda.*